

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Algra, N.E, 1974, *Inleiding tot het Nederlands Privaatrecht*, Tjeenk Willink, Gronigen.
- Arikunto, Soeharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashafa, B., 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, H. Z., 2010, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Bink, Erik J, *The Netherlands*, dalam Dennis Campbell, 1992, *Center for International Legal Studies: International Corporate Insolvency Law*, Butterworths, London.
- Endrawijaya, S., *et.al.*, 2001, *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Reaktualisasi Peran Balai Harta Peninggalan*, BPHN, Jakarta.
- Fajri, E. Z., dan Senja, R. A., 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Yogyakarta.
- Ginting, E. R, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2019, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini, R., 2020, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Huizink, J. B, 2004, *Insolventie*, Penerjemah: Linus Doludjawa, Penerbit Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hutagalung, S. M., 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jono, 2007, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kesowo, B., 2001, *Perpu Nomor 1 Tahun 1998, Latar Belakang dan Arahnya*, Alumni, Bandung.
- Lontoh, A. R., Kailimang, D., Ponto, B., 2001, *Penyelesaian Utang-piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
- Lotulung, Paulus E., 2001, *“Pengurusan Harta Pailit”*, Alumni, Bandung.

- Mochtar, Z. A., dan Hiariej, E. O. S., 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red and White Publishing, Jakarta.
- Muhammad, A., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Kartini, 2001, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung.
- Nainggolan, B., 2014, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Alumni, Bandung.
- Nuridin, Andriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung.
- Maruli Simalango, 2017, *Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan Dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung Islamic University, Bandung.
- Simatupang, T. H., 2021, *Menakar Popularitas Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan*, Balitbangkumham Press, Jakarta Selatan.
- Situmorang, Viktor M. dan Soekarso, Hendri, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, S. R., 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, S., dan Mamudji, Sri., 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subhan, M. H., 2007, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Wijayanta, T., 2015, *Undang Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, T., dan Haq, M. B. A., 2021, *Cross Border Insolvency Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yuhassarie, Emmy, 2004, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta

Jurnal:

- Adistia, S. T., dan Wijayanta, T, *Eksistensi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Pengurus Dan Pemberes Harta Pailit*, Jurnal Privat Law-Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 10 No. 3, hlm. 434 sd. 446.
- Amboro, F. Yudhi Priyo, 2020, *Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan dan PKPU*, Masalah-Masalah Hukum-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 49 No. 1, hlm. 103 sd. 111.
- Anisah, Lilies dan Suarti, Eni, 2022, *Akibat Hukum Debitor Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan-Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, Vol. 17 No. 1, hlm. 107 sd. 117.
- Atmaja, Bima Kumara Dwi dan Churairo, Mario, 2021, *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Simbur Cahaya-Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Vol. 28 No. 2, hlm. 202 sd. 215.
- Atmadja, Dewa Gede, 2018, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana-Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol. 12 No. 2, hlm. 145 sd. 155.
- Corsetti, Giancarlo, Pesenti, Paolo, dan Roubini, Nouriel, 1999, *What Caused the Asian Currency and Financial Crisis?*, Japan and the World Economy-The University of Tokyo, Tokyo, Vol. 11 Issue 3, hlm. 306 sd. 373.
- Damlah, Juditia, 2017, *Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomo 37 Tahun 2004*, Lex Crimen-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. VI No. 2, hlm. 91 sd. 98.
- Firmansyah, Raden Rizki Agung dan Sekar, I Dewa Nyoman, 2014, *Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 2 No. 5, hlm. 1 sd. 5.
- Ghazmi, Shabrina Fadiah, Muwardji, Tarsisius, dan Yuanitasari, Deviana, 2021, *Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Hak Agen Asuransi Sebagai Pemohon Pailit Asuransi*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah-Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Vol. 2 No. 3, hlm. 485 sd. 501.
- Hariyadi, Hasdi, 2020, *Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas*, SIGn Jurnal Hukum-CV. Science Political Genius, Medan, Vol. 1 No. 2, hlm. 120 sd. 135.

- Hartini, Rahayu, Malik, Mohammad Faizal Jamaluddin, dan Rohatin, Dwi Nofiyanti, 2022, *Legal Implications of Bankruptcy on Bank-related Problems and Customer's Legal Protection, in 3 rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR)*, KnE Social Sciences, Dubai, Vol. 1 No. 3, hlm. 374 sd. 389.
- Haq, M. B. A., dan Wijayanta, Tata, 2020, "Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea", *International Jurnal of Innovation, Creativity and Change*, Sydney, Vol. 14, Issue 12, hlm. 715-729.
- Hutajulu, Moraya, Kalalo, Flora Pricilla, dan Lasut, Roosje, 2020, *Tinjauan Yuridis Peranan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor BUMN*, *Lex Et Societatis-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Manado, Vol. VIII No. 4, hlm. 133 sd. 142.
- Irianto, Catur, 2015, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan-Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI*, Jakarta Pusat, Vol. 4 No. 3, hlm. 399 sd. 418.
- Johnson Simon, *et al.*, 2000, *Corporate Governance in the Asian Financial Crisis*, *Journal of Financial Economics-University of Michigan*, Michigan, Vol. 58 Issues 1-2, hlm 142 sd. 186.
- Kamahayani, Monitacia dan Margono Suyud, 2020, *Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit Pt Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:169 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2017)*, *Jurnal Hukum Adigama-Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, Jakarta Barat, Vol. 3 No. 3, hlm. 71 sd. 91.
- Kapero, Harry V. C., 2018, *Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Lex Et Societatis-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Manado, Vol. VI No. 2, hlm. 126 sd. 133.
- Karya, Wayan, 2022, *Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Tambusai-Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,Riau*, Vol. 6 No. 2, hlm 16404 sd. 16417.
- Kautsar, Izzy Al dan Muhammad, Danang Wahyu, 2020, *Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif*, *Jurnal Panorama Hukum-Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang*, Malang, Vol. 5 No. 2, hlm. 182 sd. 192.

- Kurniawan, M., 2018 "*Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", Jurnal Daulat Hukum-Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Vol. 1, No. 1, hlm. 65 sd. 76.
- Larasati, A. A. Nandhi dan Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah, 2013, *Tinjauan Yuridis Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil Terhadap Putusan Pailit Yang Bersifat Serta Merta*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 01 No. 10, hlm. 1 sd. 5.
- Levinthal, Louis E., 1918, *The Early History of Bankruptcy Law*, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, Philadelphia, Vol. 66 Issues. 5/6, hlm. 223 sd. 250.
- Maramis, Ronny A. dan Konoras, Abdurrahman, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kepailitan Debitur (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 05/Pdt.Sus PKPU/2016/PN. Niaga Mks)*, Lex Et Societatis-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 6 No. 1, hlm. 81 sd. 87.
- Margareth, Agnest Elga, *et al.*, 2019, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Termohon Pailit Dalam Kaitan Dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, USU Law Journal-Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Vol. 7 No. 4, 163 sd. 173.
- Mulyatno, Ahmad Dwi, 2022, *Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit*, Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan, & Sosial Keagamaan-Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta, Vol. 1 No. 2, hlm 156 sd. 177.
- Nadirah, Ida, 2022, *Penerapan Asas Actio Pauliana Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan (Studi Putusan No.1 Actio Pauliana/2018/Pn.Niaga Mdn)*, Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi-Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Vol. 1 No. 1, 430 sd. 435.
- Nugraha, Gede Adi dan Keneng, I Ketut, 2016, *Akibat Kepailitan Terhadap Adanya Perjanjian Hibah*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 4 No. 1, hlm. 1 sd. 5.
- Ondang, Quantri H, 2017, *Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Lex et Societatis-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 5 No. 7, hlm. 31 sd. 37.

- Pamungkas, Royfa Tri, 2021, *Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicabut Izin Usahanya*, Lex Renaissance-Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 6 No. 2, 349 sd. 359.
- Pratama, Gede Aditya, 2021, *Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia*, Krtha Bhayangkara-Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta, Vol. 15, No. 1, hlm. 1 sd. 10.
- Pujiarto, I. W., Kalo, S., dan Ikhsan, E., 2016, *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Arena Hukum-Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 8, No. 3, hlm. 318 sd. 341.
- Purwadi, Ari, 2011, *Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Mermasalah*, Perspektif-Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Surabaya, Vol. XVI No. 3, hlm. 128 sd. 139.
- Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, 2018, *Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)-Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 4 No. 1, hlm 159 sd. 178.
- Rahmadiyanti, Rindy Ayu, 2015, *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, NOTARIUS-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 8 No. 2, hlm. 252 sd. 273.
- Rokilah dan Sulasno, 2021, *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum-Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Serang Raya, Serang, Vol. 5 No. 2, hlm 114 sd. 123.
- Saija, Ronald, 2018, *Perlindungan Kreditur atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga*, Sasi-Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 25 No. 2, hlm. 180 sd. 190.
- Sembiring, Sentosa, 2017, *Eksistensi Kurator Pranata Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)-Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 3 No. 1, hlm 91 sd. 110.
- Siahaan, Hotman, 2018, *Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Solusi-Unpal-Fakultas Hukum Universitas Palembang, Palembang, Vol. 16 No. 3, hlm 274 sd. 282.
- Simatupang, T. H., 2018 "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia." Penelitian De Jure-Badan Penelitian Hukum dna HAM, Jakarta Selatan, Vol. 18, No. 3, hlm. 394 sd. 414.

- Sinaga, Niru Anita dan Sulisrudatin, Nunuk, 2016, *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 7 No. 1, hlm 158 sd. 173.
- Singal, Nicky Yehezkiel, Rumimpunu, Fritje, dan Tampongangoy, Grace H., 2022, *Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga*, Lex Privatum-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 10 No. 1, hlm. 156 sd. 177.
- Soekowathy, R. Arry Mth, *Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif*, Jurnal Filsafat-Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 35 No. 3, 288 sd. 297.
- Sonata, Depri Liber, 2012, *Permasalahan Pelaksanaan lelang eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata dalam praktik*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, Vol. 6 No. 2, hlm 1 sd. 20.
- Tendean, Brando Yohanes, 2017, *Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Lex Privatum-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. V No. 3, hlm 135 sd. 142.
- Terok, Geral Timothy Alwin, Pangkerego, Olga A., dan Karamoy, Roy V., 2022, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan*, Lex Privatum-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 10 No. 2, hlm 1 sd. 11.
- Tirayo, A. M., dan Halim, Y., 2019, *Problematic Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum-Universitas Medan Area, Medan, Vol. 6, No.2, hlm. 130 sd. 137.
- Usman, Rachmadi, 2016, *Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan*, Badamai Law Journal-Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Vol. 1 Issues 1, hlm 141 sd. 158.
- Widiarini, F. S., & Anggoro, T., 2022, *The Role of Balai Harta Peninggalan as Curator in The Management and Settlement of Bankrupt Assets*, LEGAL BRIEF-Institut Hukum Sumber Daya Alam, Sumatera Utara, Vol. 11 No. 2, hlm. 964 sd. 978.
- Wijayanta, T, 2010, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 22, No.2, hlm. 330 sd. 346.

-----, 2014, *Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga*, Jurnal Dinamika Hukum-Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 14, No. 2, hlm. 216 sd. 226.

-----, T, 2014, "*Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*", Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 26, No.1, hlm. 1 sd. 13.

Wulandari, Mona dan Basri, Saifullah, 2022, *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di Indonesia*, Wajah Hukum-Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, Vol. 6 No. 2, hlm. 441 sd. 445.

Yudoprakoso, Paulus Wisnu, 2019, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, Simposium Hukum Indonesia-Universitas Trunojoyo, Madura, Vol. 1 No. 1, hlm. 441 sd. 451.

Yuliani, Utomo, Tomi Suryo, dan Murjiyanto, R, 2020, *Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Kajian Hasil Penelitian Hukum-Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Vol. 3 No. 2, hlm. 1 sd. 17.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* (stb) 1847-23).

Verordening op de Faillissement en Surseance van Betaling (Peraturan Kepailitan) (*Staatsblad* (stb) 1905-217 jo *Staatsblad* (stb) 1906-348).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Laporan Penelitian

Agustina, Fitria, 2004, Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Harta Pailit Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Amboro, Florianus Yudhi Priyo, 2018, Perlindungan Investor Pemegang Saham Publik Melalui Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia Terhadap Perseroan Terbatas Go Public, *Disertasi*, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Baran, Titis, Skema Going Concern (Melanjutkan Usaha) Setelah Jatuh Putusan Pailit (Studi Penetapan Hakim Pengawas No. 03/Hp/X/2017-55/Pdt. Sus/Pkpu/2017/Pn. Niaga. Jkt. Pst Jo. Putusan Pailit No. 55/Pdt/Sus/Pkpu/2017/Pn. Niaga Jkt Pst), *Tesis*, Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Inayati, Raisa, 2014, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Pt Trisakti Putra Mandiri), *Skripsi*, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Julianti, Melia, 2009, Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Terhadap HakHak Pekerja Dalam Kasus Kepailitan Pt. Beta Mega Pertiwi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Kusumaningrum, Marthasia, 2011, Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

Sa'roni, 2006, Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Harta Pailit Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

Ullistiya, Dina, 2020, Bank Tanah: Konsep dan Prospek Penerapannya di Indonesia, *Skripsi*, Tidak dipublikasikan, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wawancara:

Kesowo, Bambang, 2022, Perkembangan kurator dan Terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 1998, *Wawancara*, Jakarta, 30 Oktober.

Nababan, Saut Parulian, 2022, Tugas dan Fungsi BHP sebagai kurator, *Wawancara*, Semarang, 22 September.

Ocham, Amien Fajar, 2022, Tugas dan Fungsi BHP sebagai kurator, *Wawancara*, Semarang, 22 September.

Sejati, Herlambang Fadlan, 2022, Tugas dan Fungsi BHP sebagai kurator, *Wawancara*, Semarang, 22 September.

Makalah:

Harto, Puji, 2005, *Kebijakan Diversifikasi Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik di Indonesia*, Paper, Simposium Nasional Akuntansi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Website:

Balai Harta Peninggalan Jakarta, *Sejarah Balai Harta Peninggalan*, <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-singkat> (diunggah pada tanggal 18 Agustus 2018) diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

<https://bhpsamarang.kemenkumham.go.id/layanan-publik/kepailitan> diakses pada Pukul 22.13 WIB Tanggal 13 Februari 2023

<https://bhpsamarang.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pengampuan> diakses pada Pukul 22.13 WIB Tanggal 13 Februari 2023

<https://bhpsamarang.kemenkumham.go.id/layanan-publik/surat-keterangan-hak-waris> diakses pada Pukul 22.13 WIB Tanggal 13 Februari 2023.

<https://gikken.co/mate-translate/translator/dutch-indonesian/faillissement%2Bis%2Bbeen%2Bgerechtigd%2Bbeslag%2Bop%2Bhet%2Bgehele%2Bvermogen%2Bvan%2Bbeen%2Bschuldenaar%2Bten%2Bbeh>

[oeve%2Bvan%2Bzijn%2Bgezamenlijke%2Bschuldeiser](#) diakses pada Pukul 22.08 WIB tanggal 28 November 2022.

https://sipp.pn-semarangkota.go.id/statistik_perkara diakses pada Pukul 20.12 WIB tanggal 14 Januari 2023.

<http://www.akpi.or.id/en/akpi-21/persyaratan-menjadi-kurator-%26-pengurus> diakses Pukul 4.22 WIB tanggal 25 Februari 2023.

<https://www.deepl.com/id/translator> diakses pukul 2.33 WIB pada tanggal 2 Desember 2022.

<https://www.duhaime.org/Legal-Dicti/B/Bankruptcy.aspx> diakses pada Pukul 22.55 WIB tanggal 28 Agustus 2022.